

PENGARUH EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*

**(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2008-2011)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ARDINA NURESA
NIM. C2C009235**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama penyusun : Ardina Nuresa

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009235

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH EFEKTIVITAS KOMITE
AUDIT TERHADAP *FINANCIAL*
*DISTRESS***

Dosen Pembimbing : Dr. P.Th. Basuki H., SE., MBA., MSA.,Akt

Semarang, 1 Februari 2013

Dosen Pembimbing,

(Dr. P.Th. Basuki H., SE., MBA., MSA., Akt)

NIP. 19610109 198803 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ardina Nuresa
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009235
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH EFEKTIVITAS KOMITE
AUDIT TERHADAP *FINANCIAL*
*DISTRESS***

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Februari 2013

Tim Penguji :

1. Dr. P.Th. Basuki H., SE., MBA., MSA., Akt (.....)
2. Faisal, SE., Msi., Akt, Ph.D. (.....)
3. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ardina Nuresa, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap *Financial Distress***, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 Februari 2013

Yang membuat pernyataan,

(Ardina Nuresa)

NIM. C2C009235

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Alam
Nasyroh: 5)***

“You never fail until you stop trying.” — Albert Einstein

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

— Winston Churchill

“the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”

— Theodore Roosevelt

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Papa dan Mama tercinta

***Semoga setiap langkah yang penulis lewati selalu memberikan kebanggaan dan
kebahagiaan bagi Papa dan Mama***

ABSTRACT

This study analyzes the impact of audit committee effectiveness on financial distress by using discriminant analysis (z-score). The effectiveness of audit committee can be seen from size of audit committee, independence of audit committee, frequency of audit committee meeting, and financial knowledge of audit committee. This study use one control variable is firm size. Population that use in this study is 603 listed manufacturing firms in Indonesia Stock Exchange in 2008-2011. Based on purposive sampling method, there are 209 firms. Data analysis using logistic regression with SPSS 16. The results show that frequency of audit committee meeting and financial knowledge of audit committee have significant negatively affect to financial distress.

Keywords: financial distress, audit committee, discriminant analysis (z-score), agency theory.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas komite audit terhadap kesulitan keuangan dengan menggunakan analisis diskriminan (*z-score*). Efektivitas komite audit dapat dilihat dari ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan pengetahuan keuangan komite audit. Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah 603 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Berdasarkan metode *purposive sampling*, sampel yang diperoleh sebanyak 209 perusahaan. Analisis data menggunakan regresi logistik dengan bantuan SPSS 16. Hasil analisis menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit dan pengetahuan keuangan komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesulitan keuangan.

Kata kunci: *financial distress*, komite audit, analisis diskriminan (*z-score*), teori keagenan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*”.

Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan skripsi ini. Namun berkat adanya bimbingan, bantuan moril maupun materiil, pengarahan dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, maka dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak *Prof. Dr. H.M. Nasir*, M.Si., Akt., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak *Dr. P.Th. Basuki H.*, SE., MBA., MSA., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu *Dr. Etna Nur Afri Yuyetta*, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah mendampingi dan selalu memberikan arahan bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan.

4. Bapak Faisal, SE.,Msi.,Akt,Ph.D. dan Ibu Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan agar skripsi ini dapat tersaji dengan lebih baik.
5. Para dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, terima kasih telah memberikan ilmu dan pengalaman belajar yang luar biasa.
6. Papa dan Mama tercinta, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, kepercayaan, kesabaran, perhatian, pengorbanan, serta do'a dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis..
7. Gema Pramudita dan Pratita Triasalin, kakak dan adikku yang selalu memberikan dorongan spirit dengan segenap kasih sayangnya.
8. Adhiya Kennanda, yang selalu setia mendampingi, mendukung dan memberi inspirasi untuk selalu belajar.
9. Thassaralah, sahabatku yang selalu setia mendengarkan segala keluhan dan memberikan solusi yang terbaik.
10. Teman-teman tercinta dan terbaik "Sailormoon", Riske Meitha, Pritta Amina, Alfiyani, Hanny Larasati, Kurnia Putri, Martantya Maudy, dan Pradesta. *Thanks for sharing good times and bad times. It is really priceless.*
11. Teman-teman Akuntansi Reguler 2 kelas A angkatan 2009 atas kebersamaan, kerjasama, keceriaan, bantuan, dan dorongannya. *I'll be missing you all !!!*

12. Teman-teman KKN Tim II 2012 Desa Sendangdawuhan, kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Laksmi Dewi, Henry Satrio, Shandy Bintang, Fachry Afif dan Nurma Dwi. *Let's comeback to the village!*
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu melancarkan jalannya proses penulisan ini, semoga segala kebijakan menyatu dalam keikhlasan dengan mengharap ridho Allah SWT dan semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis sangat mengharapkan atas masukan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Semarang, 1 Februari 2013

Penulis

Ardina Nuresa

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4.1 Perincian Sampel.....	53
Tabel 4.2 Deskripsi <i>Financial Distress</i>	54
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Penelitian Berdasarkan <i>Financial Distress</i>	55
Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas.....	58
Tabel 4.5 <i>Hosmer and Lemeshow's test</i>	59
Tabel 4.6 Perubahan nilai <i>-2log likelihood</i>	61
Tabel 4.7 <i>Omnibus test of model coefficient</i>	62
Tabel 4.8 <i>Cox and Snell's R Square</i> dan <i>Nagelkerke's R Square</i>	63
Tabel 4.9 Tabel Klasifikasi.....	63
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Logistik.....	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Perusahaan <i>Financial Distress</i> dan <i>Non-Financial Distress</i>	79
Lampiran B Hasil Output Statistik SPSS 16.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan perusahaan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Dalam pengelolaannya harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik karena dengan hal itu, kemungkinan perusahaan mengalami kondisi sehat atau dalam kondisi yang baik. Perusahaan sehat merupakan hasil interaksi manajemen dalam mengelola dana dan lingkungan sekitar perusahaan. Lingkungan perusahaan merupakan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan merupakan berbagai hal maupun pihak yang secara langsung terkait dengan kegiatan sehari-hari perusahaan serta mempengaruhi langsung dalam hal kebijakan dan program perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan berbagai hal maupun pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan organisasi namun memiliki pengaruh terhadap kegiatan perusahaan (keadaan sosial, politik, hukum, kebudayaan, teknologi serta pihak supplier, pelanggan pesaing).

Kegiatan pengelolaan perusahaan pasti akan menemukan kendala. Kendala perusahaan dapat menyebabkan perusahaan akan gagal atau sukses dalam mempertahankan kelangsungannya. Kegagalan perusahaan dapat diindikasikan dengan adanya kesulitan keuangan (*financial distress*). Menurut Brigham dan Daves (2003) menyatakan kesulitan keuangan dibagi menjadi dua jenis yaitu kegagalan ekonomi (*economic failure*) dan kegagalan finansial (*financial failure*). Kegagalan ekonomi dapat terjadi karena kegagalan perusahaan dalam menutupi

biaya operasi perusahaan. Sedangkan kegagalan finansial dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama yaitu *technical insolvency*, situasi dimana perusahaan gagal membayar kewajibannya yang jatuh tempo namun aset yang dimiliki lebih besar dari total hutang yang dimiliki. Kedua yaitu kebangkrutan situasi dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada debitur karena perusahaan mengalami kekurangan atau ketidakcukupan dana untuk melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi oleh perusahaan tidak dapat dicapai. Kegagalan perusahaan dalam mengatasi kesulitan keuangan dapat dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang buruk, misalnya keputusan yang tidak tepat yang diambil oleh manajemen atau kurangnya upaya pengawasan kondisi keuangan sehingga terdapat penggunaan dana yang kurang tepat.

Corporate governance merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (*Forum Corporate Governance in Indonesia, 2002*). Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) menjadi sangat penting di Indonesia setelah adanya krisis finansial di negara Asia termasuk Indonesia yaitu pada tahun 1997. Kelemahan dalam *corporate governance* merupakan salah satu sebab utama kerawanan ekonomi yang mengakibatkan memburuknya perekonomian di negara-negara Asia tahun 1997 dan 1998 (Husnan, 2001). Menurut Ho dan Wong (2001), krisis finansial di Asia bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya kepercayaan dari investor namun juga

disebabkan oleh kemunduran *corporate governance* suatu perusahaan. Berbagai skandal kasus yang menyebabkan perusahaan-perusahaan besar Indonesia bangkrut karena krisis ekonomi seperti perusahaan Salim Group dan Garuda Indonesia. Kedua perusahaan tersebut sempat mengalami kebangkrutan namun dapat bangkit kembali dengan membangun *corporate governance* lebih baik.

Pembentukan komite audit merupakan salah satu hal yang penting dalam menciptakan *corporate governance* yang baik. Komite ini berperan penting dalam memantau operasi perusahaan dan sistem pengendalian internal dengan tujuan melindungi pemegang saham. Komite audit memberikan kontribusi untuk pengembangan manajemen strategis dari perusahaan dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk dewan dengan melihat setiap masalah keuangan dan operasional. Komite audit yang efektif diharapkan untuk fokus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham dan mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen puncak (Wathne, 2000).

Komite audit di Indonesia merupakan hal yang relatif baru. Perkembangannya terlambat dibandingkan dengan negara lain. Hal itu disebabkan pemerintah baru saja menetapkan kebijakan tentang pemberlakuan komite audit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu pada tahun 1999. Selain itu Bapepam memberikan persyaratan pencatatan perusahaan di Bursa Efek Indonesia agar memiliki komite audit baru di instruksikan pada tahun 2000. Sehingga untuk perusahaan *go public* harus menyertakan laporan tata kelola perusahaan yang terkandung laporan komite audit dalam laporan tahunan perusahaan. Bapepam melalui surat edaran No. SE/03/PM/2000, dalam surat edaran tersebut dijelaskan

bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Pada Kep-339/BEJ/07-2001 mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki komite audit. Beberapa ketentuan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit.
- b. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.
- c. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN menerapkan praktek *Good Corporate Governance*.
- d. Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit.

Komite audit pada saat ini telah diakui keberadaanya di hampir semua perusahaan. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolok ukur keberhasilan atau efektivitas komite audit. Belum terdapat hasil pembuktian secara empiris mengenai hal tersebut. Menurut Sommer (1991) bahwa komite audit di banyak perusahaan masih belum melakukan tugasnya dengan baik. Banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti review laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan

tanggungjawab oleh manajemen. Penyebabnya bukan hanya karena banyak dari mereka tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, tetapi juga karena banyak yang belum memahami peran pokoknya (Manao,1997).

Komite audit merupakan bagian dari sumbangan strategi kepemimpinan perusahaan untuk keberhasilan upaya perubahan arah perusahaan (Rahmat *et al.*, 2008). Hal ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki anggotanya serta performa kinerja dari komite audit itu sendiri. Menurut Simpson dan Gleason (1999) komite audit yang berkompeten memiliki kapasitas untuk mengurangi kesulitan keuangan suatu perusahaan (Rahmat *et al.*, 2008). Oleh karena itu, efektivitas komite audit dikaitkan dengan kemakmuran atau *financial distress*.

Adanya efektivitas komite audit melalui pemahaman atas karakteristik-karakteristik komite audit, hal itu diharapkan dapat mengurangi adanya *financial distress*. Karakteristik tersebut antara lain ukuran komite audit, independensi anggota komite audit, aktivitas dari komite audit dan pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit. Ukuran komite audit berhubungan dengan struktur anggota komite audit dimana salah satu anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit. Sedangkan independensi merupakan dari jumlah anggota komite audit tersebut harus terdapat anggota independen yang tidak terkait terhadap aktivitas perusahaan. Aktivitas komite audit diwujudkan melalui frekuensi pertemuan komite audit dalam satu tahun. Jumlah pertemuan dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan

besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Namun, pada umumnya komite audit bersidang tiga sampai empat kali dalam setahun yaitu sebelum laporan keuangan dikeluarkan, sesudah pelaksanaan audit dan sebelum laporan keuangan dikeluarkan, serta sebelum RUPS tahunan (Ataina 2000). Sedangkan pengetahuan keuangan yang dimiliki komite audit berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman dalam tata kelola perusahaan. Anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Keberadaan anggota komite audit yang memiliki kemampuan atau pengalaman dibidang akuntansi atau keuangan sudah disyaratkan oleh BEI.

Dengan melihat karakteristik komite audit tersebut diharapkan memiliki hubungan negatif dengan *financial distress*. Menurut Carcello dan Neal (2000) komite audit independen secara negatif terkait dengan *financial distress*. Semakin independen sebuah komite audit, semakin rendah kemungkinan perusahaan *financially distress* akan menerima opini *going concern* dari auditor eksternal. Oleh karena itu, efektivitas komite audit dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi kesulitan keuangan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh efektivitas komite audit. Namun, dalam penelitian tentang efektivitas komite audit yang berhubungan dengan kesulitan keuangan masih belum banyak dilakukan secara spesifik. Efektivitas komite audit sering dikaitkan dengan kualitas penyajian kembali laporan keuangan (Sharma, 2005) atau kesulitan keuangan yang dikaitkan dengan mekanisme *corporate governance* (Wardhani, 2006). Karakteristik komite

audit sudah diteliti terkait dengan kesulitan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia dengan menggunakan *proxy Interest Coverage Ratio (ICR)* (Anggraini, 2010).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bertujuan untuk meneliti pengaruh efektivitas komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan analisis diskriminan (*z-score*). Efektivitas komite audit diketahui melalui ukuran komite audit, independensi anggota komite audit, aktivitas komite audit melalui frekuensi pertemuan komite audit serta pengetahuan keuangan komite audit. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan *financially distressed* yang dibandingkan dengan perusahaan *non financially distressed* yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2011, pemilihan periode tersebut dikarenakan periode tersebut merupakan periode terbaru untuk dapat dilakukan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini adalah semakin banyak perusahaan yang mengalami *financial distress* karena beberapa hal, salah satunya adalah *corporate governance* yang buruk yang ditandai dengan ketidakefektivitasan komite audit. Sehingga dengan memelihara efektivitas komite audit diharapkan dapat mengurangi kemungkinan adanya *financial distress*.

Permasalahan yang timbul sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan adanya *financial distress*?

2. Apakah independensi anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan adanya *financial distress*?
3. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan adanya *financial distress*?
4. Apakah pengetahuan keuangan anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan adanya *financial distress*?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh independensi anggota komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan.
4. Menganalisis pengaruh pengetahuan keuangan anggota komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan.

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi pengembangan praktek dapat mengetahui pentingnya pengawasan mekanisme *corporate governance* dengan melihat keefektifitasan komite audit serta mengetahui pentingnya peran komite audit untuk mencegah terjadinya *financial distress*.

- b. Bagi pengembangan pengetahuan akuntansi dapat memberikan kontribusi dalam penelitian sejenis atau dapat dijadikan sebagai kajian teori dan referensi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini digunakan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan (*Agency Theory*) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak kerja sama (*nexus of contract*) yang mana satu atau lebih *principal* menggunakan orang lain atau *agent* untuk menjalankan aktivitas perusahaan. *Principal* adalah pemegang saham/ pemilik/ investor, sedangkan *agent* adalah manajer atau manajemen yang mengelola perusahaan. *Principal* menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan, sedangkan *agent* berkewajiban mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran pemilik atau laba perusahaan.

Konflik keagenan terjadi karena kepentingan *principal* dalam memperoleh laba terus bertambah sedangkan *agent* tertarik untuk menerima kepuasan yang terus bertambah berupa kompensasi keuangan sehingga *agent* sering mengambil keputusan tidak dalam kepentingan terbaik *principal*, khususnya bila orang yang oportunistik terlibat di dalamnya (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Fama dan Jensen (1983) tidak adanya prosedur pengawasan yang efektif, manajemen kemungkinan akan melakukan penyimpangan yang merugikan pemegang saham. Misalnya dengan memperlihatkan beberapa kondisi perusahaan seolah-olah target tercapai. Sehingga pemegang saham merasa manajemen melakukan kegiatan dengan baik dan menghasilkan laba. Namun karena tidak adanya pengawasan efektif dari pemegang saham sehingga manajemen terus-menerus memberikan

keterangan palsu pada pemegang saham yang akhirnya dapat muncul permasalahan pada perusahaan seperti *financial distress*.

Financial distress pada perusahaan terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan dapat memenuhi kewajibannya (Brigham dan Daves, 2003). Hal itu dikarenakan adanya pengambilan keputusan yang tidak tepat serta kurangnya pengawasan dari pihak *principal* untuk kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh *agent*.

Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal (Bradbury *et al.*, 2004). Dengan adanya komunikasi yang efektif dan efisien tersebut komite audit dapat berperan menyelesaikan konflik antara *principal* dan *agent* serta untuk menjaga kinerja yang lebih baik.

2.1.2 Komite Audit

Pada tahun 2000 Bapepam mengeluarkan surat edaran SE/03/PM/2000 mengenai pembentukan komite audit. Pada tahun selanjutnya Ketua BEI mengeluarkan Kep. Direksi BEI No. 339 tahun 2001 mengenai peraturan pencatatan efek di bursa yang mencakup komisararis independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Namun, peraturan tentang keberadaan komite audit saja belum cukup untuk

meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Bapepam mengeluarkan Keputusan ketua Bapepam No. Kep-411PM/2003 yang mengatur tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Kemudian, peraturan tersebut direvisi dengan dikeluarkannya keputusan ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Peraturan tersebut mengatur tentang kriteria khusus bagi seseorang yang akan menjabat sebagai ketua maupun anggota komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit. Dengan adanya peraturan tersebut komite audit menjadi lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya.

Definisi komite audit sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka serangkaian ketentuan mengenai komite audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit.

- b. Surat edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit.
- d. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.
- e. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.

2.1.2.1 Efektivitas Komite Audit

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai, efektivitas lebih berorientasi kepada *output* (Sedarmayanti, 2001) sehingga dapat disimpulkan target perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal tanpa adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu ukuran komite audit yang sesuai dengan aturan Bursa Efek Indonesia, adanya anggota independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan yang sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan (minimal 3 kali pertemuan), dan pengetahuan keuangan dari salah satu atau lebih anggota komite audit merupakan penentu dari keefektivitasan suatu komite audit.

Price Waterhouse (dalam Ataina 2000) merekomendasikan bahwa komite audit secara periodik harus mengevaluasi kinerjanya. Ataina (2000) berpendapat

bahwa evaluasi komite audit sebaiknya dilakukan oleh akuntan publik yang independen yang bukan akuntan publik perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Sommer (1991) dalam Ataina (2000) yang menyatakan bahwa auditor mempunyai posisi yang strategis untuk mengevaluasi kinerja komite audit. Hal ini disebabkan karena auditor merupakan pihak yang sering bergaul dengan berbagai komite audit suatu perusahaan. Selain itu, akuntan publik juga menerapkan sistem *peer review* (evaluasi kinerja suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh KAP lain) dalam melakukan evaluasi kinerja sehingga hasil evaluasi lebih bersifat kredibel. Komite audit juga harus mereview hasil evaluasi tersebut dengan seluruh anggota dewan komisaris (Ataina 2000).

2.1.2.2 Peran dan Tanggungjawab Komite Audit

Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam-LK No/IX/1/5, tugas dan tanggungjawab komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal.

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan.

2.1.2.3 Struktur Komite Audit

Struktur komite audit di setiap negara tidak sama. Di Indonesia struktur komite audit diatur dalam Kep. Men. 117/2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan Bapepam yang relevan. Ketentuan mengenai struktur komite audit menurut keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Nomor VIII A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.
6. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

2.1.2.4 Independensi Komite Audit

Independensi merupakan landasan dari efektivitas komite audit. Kinerja komite audit menjadi efektif jika para anggotanya memiliki kemandirian dalam menyatakan sikap dan pendapat. Untuk menjamin independensi, Bapepam (2004) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka

waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

4. Tidak mempunyai:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun secara vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
- b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

2.1.2.5 Pertemuan Komite Audit

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah pertemuan formal dan informal. Pertemuan formal komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan komite audit. Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

1. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal.

Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite audit. Jumlah pertemuan dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Namun, pada umumnya komite audit bersidang tiga sampai empat kali dalam setahun yaitu sebelum laporan keuangan dikeluarkan, sesudah pelaksanaan audit dan sesudah laporan keuangan dikeluarkan, serta sebelum RUPS tahunan (Ataina 2000).

2.1.2.6 Pengetahuan Keuangan Komite Audit

Anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Keberadaan anggota komite audit yang memiliki kemampuan atau pengalaman dibidang akuntansi atau keuangan sudah disyaratkan oleh BEI.

The Sarbanes Oxley Act menyinggung tentang keberadaan ahli akuntansi atau keuangan dalam komite audit tetapi tidak memberikan kriteria yang pasti mengenai orang yang dapat disebut sebagai "*financial expert*". UU ini hanya meminta SEC merumuskan kriteria "*financial expert*" dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller*, *chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis.
2. Pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan.
3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan.
4. Pengalaman dalam pengendalian internal.
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*).

2.1.3 Financial Distress

Penjelasan mengenai *financial distress* diawali dengan definisi *financial distress*, indikator terjadinya *financial distress*, dan manfaat informasi prediksi *financial distress*.

2.1.3.1 Definisi *Financial Distress*

Beberapa ahli ekonomi memiliki pengertian yang berbeda mengenai *financial distress*. Berikut para ahli ekonomi yang mengemukakan pendapatnya:

1. Menurut Altman (1968), *financial distress* digolongkan ke dalam empat istilah umum, yaitu:

- a. *Economic Failure*

Economic Failure terjadi ketika pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya termasuk biaya modal. Usaha yang mengalami hal tersebut dapat meneruskan operasinya sepanjang kreditur berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (*return*) di bawah tingkat bunga pasar.

- b. *Business Failure*

Business Failure seringkali digunakan untuk menggambarkan berbagai macam kondisi bisnis yang tidak memuaskan. *Business Failure* mengacu pada sebuah perusahaan berhenti beroperasi karena ketidakmampuannya untuk menghasilkan keuntungan atau mendatangkan penghasilan yang cukup untuk menutupi pengeluaran. Sebuah bisnis yang menguntungkan dapat gagal jika tidak menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi pengeluaran

- c. *Insolvency*

- 1) *Technical insolvency*

Kondisi dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo sebagai akibat dari ketidakcukupan arus kas.

2) *Insolvency in Bankruptcy Sense*

Kondisi dimana total kewajiban lebih besar dari nilai pasar total aset perusahaan. Dan karena itu memiliki ekuitas yang negatif.

d. *Legal Bankruptcy*

Sebuah bentuk formal kebangkrutan dan telah disahkan secara hukum.

2. Menurut Ross *et al.* (1996), *financial distress* adalah ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan kata lain perusahaan mengalami *insolvency*.
3. Menurut Almilia dan Herdiningtyas (2005) *financial distress* merupakan keadaan dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada debitor karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana dimana total kewajiban lebih besar daripada total aset, serta tidak dapat mencapai tujuan ekonomi perusahaan, yaitu *profit*.

Dalam penelitian terdahulu, untuk melakukan pengujian apakah suatu perusahaan mengalami *financial distress* dapat ditentukan dengan berbagai cara, seperti:

- a) Menurut Altman (1968) mendefinisikan *financial distress* dengan mempergunakan angka-angka di dalam laporan keuangan dan merepresentasikannya dalam suatu angka, yaitu *Z-Score* yang dapat menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu perusahaan berpotensi untuk bangkrut atau tidak.

- b) Menurut Asquith, Gertner, dan Scharfstein (1994) melakukan pengukuran *financial distress* menggunakan *interest coverage ratio* untuk mendefinisikan *financial distress*.
- c) Menurut Lou (1987) dan Hill *et al.* (1996), dilihat dengan adanya pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran deviden.
- d) Menurut Hofer (1980) dan Whitaker (1999) mendefinisikan *financial distress* jika tahun perusahaan mengalami laba operasi bersih negatif.

2.1.3.2 Indikator Terjadinya *Financial Distress*

Indikator yang harus diperhatikan manajemen perusahaan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasinya, seperti yang dikemukakan oleh Harnanto (1984) yaitu:

1. Penurunan volume penjualan karena adanya perubahan selera atau permintaan konsumen
2. Kenaikan biaya produksi
3. Tingkat persaingan yang semakin ketat
4. Kegagalan melakukan ekspansi
5. Ketidakefektifan dalam melaksanakan fungsi pengumpulan piutang
6. Kurang adanya dukungan atau fasilitas perbankan (kredit)
7. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap piutang.

Adapula indikator yang harus diperhatikan pihak eksternal, antara lain:

1. Penurunan deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham
2. Terjadinya penurunan laba yang terus-menerus, bahkan sampai terjadinya kerugian

3. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha
4. Terjadinya pemecatan pegawai
5. Pengunduran diri eksekutif puncak
6. Harga saham yang terus menerus turun di pasar modal

2.1.3.3 Manfaat Informasi Prediksi *Financial Distress*

Salah satu tanggung jawab perusahaan adalah menghasilkan kinerja yang baik agar terhindar dari *financial distress*. Kinerja tersebut dapat dicerminkan dalam kemampuannya memprediksi adanya indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya prediksi tersebut dapat memberikan manfaat kepada perusahaan (Foster,1986) yaitu:

1. Kreditur

Hubungan yang erat dengan lembaga ini baik mengambil keputusan apakah akan memberikan pinjaman dengan syarat-syarat tertentu atau merancang kebijaksanaan untuk memonitor pinjaman yang telah ada.

2. Investor

Distress prediction model dapat membantu investor dalam menentukan sikap terhadap surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Investor dapat mengembangkan suatu strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa model prediksi *financial distress* dapat menjadi peringatan awal adanya kesulitan keuangan pada suatu perusahaan.

3. Otoritas Pembuat Peraturan

Seperti halnya ikatan akuntan, badan pengawas pasar modal atau institusi lainnya, studi tentang *financial distress* sangat membantu untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat melindungi kepentingan masyarakat.

4. Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi tenaga kerja, industri, dan masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam mengeluarkan peraturan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kemungkinan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik negara.

5. Auditor

Satu penelitian yang harus dibuat oleh auditor adalah apakah perusahaan bisa *going concern* atau tidak. Dengan adanya model untuk memprediksi kebangkrutan, maka auditor dapat melakukan audit dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan dengan lebih baik.

6. Manajemen

Financial Distress akan menyebabkan adanya biaya baik langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung termasuk *fee* untuk akuntan dan pengacara. Sedangkan biaya tidak langsung adalah kehilangan penjualan atau keuntungan yang disebabkan adanya pembatasan yang dilakukan oleh pengadilan. Untuk menghindari biaya yang cukup besar tersebut,

manajemen dengan indikator kesulitan keuangan dapat melakukan persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

2.1.4 Analisis Diskriminan Model Altman (Z-score)

Formula Z-score untuk memprediksi kebangkrutan diterbitkan pada tahun 1968 oleh Edward I. Altman. Formulanya dapat digunakan untuk menguji apakah perusahaan akan masuk dalam kategori perusahaan *financial distress* atau *non financial distress*. Altman mempergunakan angka-angka di dalam laporan keuangan dan merepresentasikannya dalam suatu angka, yaitu *Z-Score*. Output tunggal ini juga dapat membantu memecahkan kebuntuan apabila kita mencoba untuk menganalisis berbagai rasio yang terkadang penafsirannya saling bertentangan.

2.1.4.1 Formula Altman (Z-score)

Analisis diskriminan (*z-score*) ini merupakan peringatan awal *financial distress*. Semakin awal tanda-tanda kesulitan keuangan (*financial distress*), semakin baik bagi manajemen karena bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Begitu juga dengan kreditur dan investor dapat mengatasi kemungkinan terburuk. Dengan formula ini, *financial distress* dapat dihindari :

$$Z\text{-Score} = 1.2T_1 + 1.4T_2 + 3.3T_3 + 0.6T_4 + 0.999T_5$$

Keterangan:

T_1 = Working Capital / Total Assets.

T_2 = Retained Earnings / Total Assets

T_3 = Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets

T_4 = Market Value of Equity / Total Liabilities

$$T_5 = \text{Sales} / \text{Total Assets}$$

Penafsiran dari nilai Z yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- a. $Z\text{-Score} > 3,00$ – Berdasarkan laporan keuangan, perusahaan dianggap aman
- b. $2,70 \leq Z\text{-Score} < 2,99$ – Terdapat kondisi keuangan di suatu bagian yang membutuhkan perhatian khusus
- c. $1,80 \leq Z\text{-Score} < 2,70$ – Ada kemungkinan perusahaan akan mengalami *financial distress* dalam 2 tahun ke depan
- d. $Z < 1,80$ – Perusahaan berpotensi kuat akan mengalami *financial distress*.

Namun, penelitian tersebut dilakukan di perusahaan-perusahaan Amerika yang tentunya berbeda dengan perusahaan di Indonesia, sehingga penelitian Pudjiono (2009) dapat menjadi acuan dalam meneliti adanya *financial distress* pada perusahaan *go-public* di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan 14 rasio keuangan dan menghasilkan formula sebagai berikut:

$$Z = 0,777 + 1,039X_1 - 0,657X_2 + 0,019X_3$$

Keterangan:

$$X_1 = \text{Working Capital to Total Assets ratio (WC/TA)}$$

$$X_2 = \text{Long-term debt to Total Equity (LTD/TE)}$$

$$X_3 = \text{Price Earning Ratio (PER)}$$

Berdasarkan nilai *cut-off* yang dihasilkan dari penelitian tersebut, maka perusahaan yang memiliki:

- a. *z-score* kurang dari nol ($z\text{-score} < 0$) diklasifikasikan sebagai perusahaan *financial distress*.

- b. *z-score* lebih dari 0 ($z\text{-score} > 0$) diklasifikasikan sebagai perusahaan *non financial distress*.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji tentang efektivitas komite audit yang diuraikan dengan beberapa karakteristik dari komite audit serta pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* antara lain sebagai berikut:

Penelitian Wardhani (2006) menguji mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress* pada perusahaan Indonesia. Menggunakan variabel independen ukuran dewan direksi & dewan komisaris, independensi dewan komisaris, *turn over* direksi, dan struktur kepemilikan. Kriteria *financial distress* didasarkan pada *interest coverage ratio (operating profit/interest expense)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direktur, *turnover* direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan keberadaan komisaris independen dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian Lin *et al.* (2006) meneliti hubungan karakteristik komite audit dengan penyajian laba kembali pada perusahaan publik di Amerika Serikat pada tahun 2000. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen karakteristik komite audit yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan, aktivitas komite audit dan kepemilikan saham. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran komite audit berhubungan negatif dengan penyajian

kembali laba. Sedangkan empat karakteristik komite audit yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang dilaporkan.

Penelitian Rahmat *et al.* (2008) meneliti hubungan karakteristik komite audit dengan *financial distressed*. Sampel yang digunakan terdiri dari 73 sampel perusahaan *distressed* (PN4) dan 73 perusahaan *non distressed* (non-PN4) yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun pertama pembentukan komite audit di Malaysia tahun 2000. Karakteristik komite audit yang digunakan yaitu ukuran, komposisi direksi non eksekutif, frekuensi pertemuan dan keahlian keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesulitan keuangan secara signifikan berhubungan dengan keahlian anggota komite audit di bidang keuangan. Ketentuan Bursa Malaysia bahwa komite audit harus memiliki setidaknya satu orang merupakan anggota dari *Malaysian Institute of Accountant* (MIA) dan memiliki pengalaman tidak kurang dari tiga tahun di bidang keuangan, dapat bekerja lebih baik dibandingkan dengan komite audit perusahaan yang kurang pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan. Sedangkan tiga variabel lain yaitu ukuran, komposisi direksi non eksekutif, dan frekuensi pertemuan dari komite audit tidak ada hubungan yang signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian Putra (2010) menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap penyajian laba kembali. Menggunakan variabel independen berupa proporsi independen komite audit, frekuensi pertemuan, dan keahlian keuangan komite audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan karakteristik komite audit yang baik yaitu proporsi independen komite audit,

frekuensi pertemuan, dan keahlian keuangan komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyajian laba kembali.

Penelitian Anggraini (2010) menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress*. Menggunakan variabel independen berupa ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan karakteristik komite audit baik yang ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Vineeta Divesh Sharma (2005)	The Effect Independent Audit Committee Member Characteristics and Auditor Independence on Financial Restatement	Penyajian kembali laporan keuangan, keahlian, rapat, reputasi (independensi), masa perikatan komite audit, kompensasi dan <i>non-audit fee</i> .	Keahlian, rapat, independensi, masa perikatan komite audit, dan <i>fee</i> berpengaruh signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan.
2.	Ratna Wardhani (2006)	Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)	<i>Financial distress</i> , ukuran dewan direksi dan dewan komisaris, independensi dewan komisaris, <i>turn over</i> direksi, struktur kepemilikan, <i>log total asset</i> , dan <i>dummy year</i> .	Ukuran dewan direktur, <i>turn over</i> direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>financial distressed</i> , sedangkan independensi dewan komisaris dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara

				signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
3.	J.W Lin, J.F Li, dan J.S Yang (2006)	<i>The Effect of audit committee performance on earnings quality</i>	Penyajian kembali laba, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan, aktivitas, dan kepemilikan saham.	Ukuran komite audit berhubungan negatif dengan penyajian laba kembali. Sedangkan independensi, keahlian keuangan, aktivitas komite audit dan kepemilikan saham tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian laba kembali.
4.	M M. Rahmat, Takiah M. Iskandar, dan Norman M. Saleh (2008)	Audit Committee Characteristic in Financially Distressed and Non-distressed Companies	<i>Financial distressed</i> , ukuran komite audit, proporsi direksi non-eksekutif, frekuensi pertemuan, keahlian keuangan.	Keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>financial distressed</i> . Sedangkan ukuran, proporsi direksi non-eksekutif, dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>financial distressed</i> .
5.	Akbar Rahman Bagyo Putra (2010)	Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Penyajian Laba Kembali	Penyajian Laba Kembali, proporsi independen komite audit, frekuensi pertemuan, dan keahlian keuangan komite audit.	Proporsi independen komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan keahlian keuangan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penyajian laba kembali.
6.	Tifani Vota Anggarini (2010)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i>	Ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit	Karakteristik komite audit baik yang ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite

				audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> . Proxy yang digunakan adalah ICR (<i>Interest Coverage Ratio</i>).
--	--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian ini, dalam menganalisis pengaruh efektivitas komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan menggunakan analisis diskriminan (*z-score*). Hal itu dikarenakan analisis ini mewakili beberapa rasio keuangan dalam menganalisis adanya *financial distress*. Sehingga diharapkan *z-score* dapat menjadi pedoman untuk menentukan apakah perusahaan masuk kategori *financially distressed* atau *non financially distressed*.

2.2 Kerangka Pemikiran

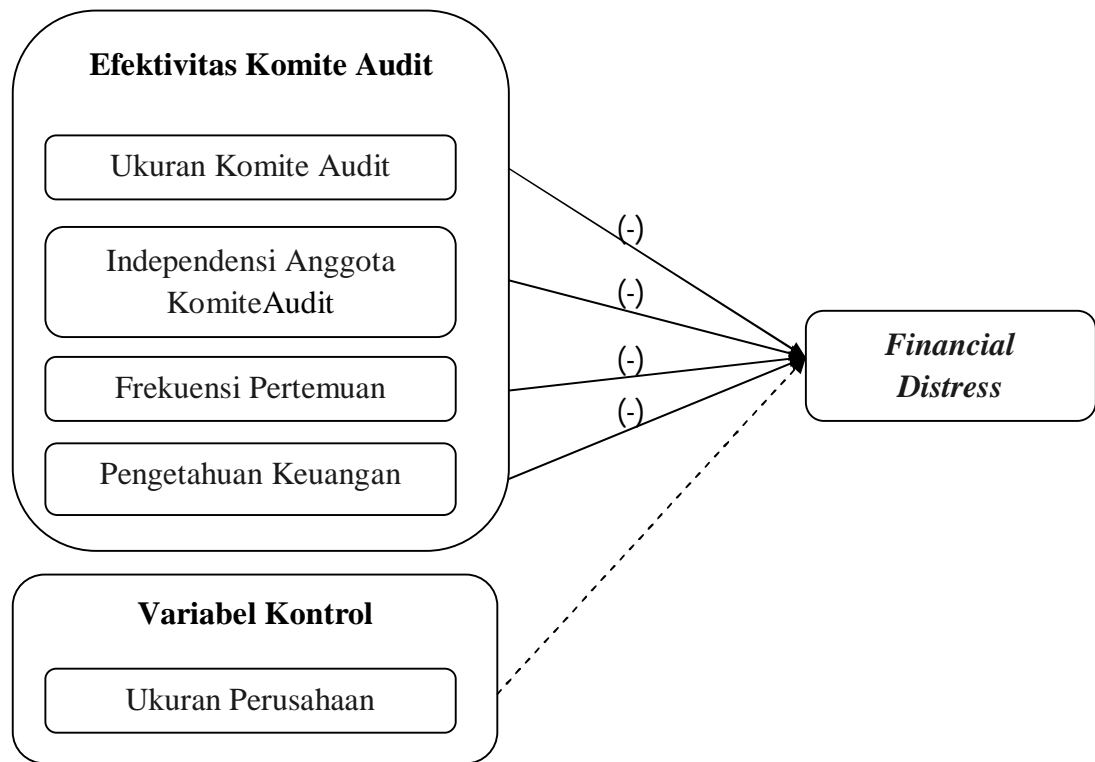
Banyaknya perusahaan yang tidak memikirkan lemahnya *corporate governance* dapat meningkatkan potensi kegagalan perusahaan. Hal itu menjadikan objek penelitian tentang mekanisme *corporate governance* melalui efektivitas kinerja komite audit pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada BEI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas komite audit terhadap *financial distress*. Efektivitas komite audit diuraikan menjadi beberapa karakteristik komite audit dengan membandingkan perusahaan *financial distress* dan *non financial distress*.

Dalam penelitian ini, efektivitas komite audit dapat dilihat melalui ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan

pengetahuan keuangan anggota komite audit. Keempat karakteristik tersebut adalah faktor penentu efektivitas kinerja mereka yang memiliki pengaruh untuk menganalisis adanya *financial distress*. Gambar berikut ini menunjukkan kerangka pemikiran yang akan menggambarkan alur pemahaman konsep penelitian ini, ditunjukkan dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis memperlihatkan hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

2.3.1 Ukuran Komite Audit dan *Financial Distress*

Dalam rangka untuk membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggungjawab. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2002). Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda.

Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun ke depan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan karena kurangnya kinerja yang baik. Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan adanya tim yang terdiri dari beberapa orang yang berpengalaman. Berdasarkan argumen tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1. Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap adanya *financial distress*

2.3.2 Independensi Komite Audit dan *Financial Distress*

Peraturan BEI dan ketentuan pedoman *corporate governance* dalam pembentukan komite audit yang efektif menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Syarat anggota komite audit harus berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Dengan adanya komite audit independen bertujuan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif atas keberadaan pihak-pihak independen pada susunan keanggotaan komite audit terhadap kinerja komite audit. Seperti penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) yang membuktikan bahwa direktur non eksekutif akan mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan (Rahmat *et al.*, 2008).

Kehadiran anggota yang independen sebagai mayoritas anggota komite audit akan meningkatkan independensi komite dan akan mengoptimalkan reputasi komite audit sebagai monitor yang baik, karena anggota yang independen mampu

memberikan opini yang independen, lebih obyektif dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Porter dan Gendall, 1993) dalam Rahmat *et al* (2008). Adanya anggota independen pada komite audit juga dapat menambah kepercayaan investor terhadap penyajian laporan keuangan dan akan mengurangi kemungkinan perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap adanya *financial distress*

2.3.3 Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan *Financial Distress*

Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan menjaga informasi manajemen (McMullen dan Raghunandan, 1996) dalam Rahmat *et al.* (2008). Pertemuan rutin menjadi salah satu bentuk keefektivitasan komite audit.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas terstruktur dan dikontrol dengan baik oleh ketua komite. Collier dan Gregory (1999) dalam (Rahmat *et al.*, 2008) mengungkapkan bahwa komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan.

Komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3. Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap adanya *financial distress*

2.3.4 Pengetahuan Keuangan Komite Audit dan *Financial Distress*

Pengetahuan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan keefektifitasan komite audit. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat *et al.*, 2008).

Penyimpangan pengawasan internal juga akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Beberapa keberhasilan pelacakan *fraud* tertentu tergantung pada pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit. Menurut Dezoort *et al.* (2002) dalam (Putra, 2010) menyatakan bahwa pengetahuan keuangan anggota komite audit akan meningkatkan sebuah salah saji material yang ditemukan dan akan dikomunikasikan serta dikoreksi secepatnya.

Komite audit dengan anggota yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Hal itu dikarenakan dengan adanya keberadaan personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan serta berusaha keras untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4. Pengetahuan Keuangan Anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap adanya *financial distress*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Analisis data pada penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel kontrol. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *financial distress*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi anggota komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan pengetahuan keuangan anggota komite audit. Sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan.

3.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *financial distress* atau kesulitan keuangan yang terjadi pada perusahaan. Penelitian ini mendefinisikan perusahaan yang mengalami *financial distress* dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pudjiono (2009) yaitu menggunakan analisis diskriminan model Altman (*z-score*). Penelitiannya mengidentifikasi perusahaan manufaktur *go public* di Indonesia dengan menggunakan 14 rasio keuangan dan terpilih tiga rasio keuangan yang membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan tidak mengalami *financial distress*. Sehingga fungsi diskriminan yang terbentuk:

$$Z = 0,777 + 1,039X_1 - 0,657X_2 + 0,019X_3$$

Keterangan:

X_1 = *Working Capital to Total Assets ratio* (WC/TA)

Rasio ini mengukur likuiditas dari total aset dan posisi modal kerja bersih. Rasio ini merupakan selisih antara aset lancar dengan hutang lancar yang kemudian hasilnya dibagi dengan total aset. Biasanya perusahaan yang mengalami kerugian terus-menerus akan mengalami penurunan aset lancar dalam perbandingannya terhadap total aset.

X2 = *Long-term debt to Total Equity* (LTD/TE)

Rasio ini melihat hutang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas. *Long-term Debt to equity ratio* juga dapat berarti sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar hutangnya dengan jaminan modal sendiri.

X3 = *Price Earning Ratio*(PER)

Rasio ini melihat perbandingan antara harga pasar saham dengan pendapatan yang diterima.

$$\text{Price Earning Ratio} = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Earning per Share}}$$

Berdasarkan nilai *cutoff* yang dihasilkan dari penelitian tersebut, maka perusahaan yang memiliki *z-score* kurang dari nol ($z\text{-score} < 0$) diklasifikasikan sebagai perusahaan *financially distressed* dan yang lebih dari 0 ($z\text{-score} > 0$) diklasifikasikan sebagai perusahaan *non financially distressed*.

Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan variabel *dummy*. Dalam Ghozali (2006) variabel *dummy* adalah :

Variabel *dummy* atau kualitatif menunjukkan keberadaan (*presence*) atau ketidakberadaan (*absence*) dari kualitas atau suatu atribut. Cara mengkuantifikasi

variabel kualitatif di atas adalah dengan membentuk variabel artifisial dengan nilai 1 atau 0, 1 menunjukkan keberadaan atribut dan 0 menunjukkan ketidakberadaan atribut.

Pemberian skor pada variabel ini adalah nilai 1 (satu) pada perusahaan *financially distressed* ($z\text{-score} < 0$) dan 0 (nol) pada perusahaan *non financially distressed* ($z\text{-score} > 0$).

3.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi anggota komite audit, frekuensi pertemuan, dan pengetahuan keuangan anggota komite audit.

3.1.2.1 Ukuran Komite Audit

Komite audit pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen, hal itu berdasarkan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000. Variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota di dalam komite audit.

3.1.2.2 Independensi Komite Audit

Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, independensi dari setiap anggota diukur dengan persyaratan:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang

bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.

2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
4. Tidak mempunyai:
 - a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun secara vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
 - b) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

Independensi dimaksudkan untuk memelihara integritas serta pandangan yang obyektif dalam pelaporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena anggota yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak dalam menangani suatu permasalahan. Independensi komite audit pada

penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. Independensi Komite Audit (ACINDP) diperoleh dari perhitungan:

$$ACINDP = \frac{\text{Jumlah anggota} - \text{anggota non independen}}{\text{Jumlah anggota}} \times 100\% \quad (3.2)$$

3.1.2.3 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Pedoman FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan pertemuan paling sedikit setiap tiga bulan atau minimal empat kali pertemuan dalam satu tahun. Variabel frekuensi pertemuan komite audit dalam penelitian ini merupakan variabel *dummy*. Pemberian kode pada variabel ini adalah 1 (satu) jika anggota mengadakan pertemuan minimal empat kali dalam satu tahun, dan 0 (nol) jika anggota komite audit mengadakan pertemuan kurang dari empat kali dalam satu tahun (Putra, 2010).

3.1.2.4 Pengetahuan Keuangan Anggota Komite Audit

Anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang anggota yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa minimal salah seorang dari anggota komite audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomi bergelar sarjana muda, sarjana, magister, dan doktor dari Universitas dalam negeri maupun luar negeri

atau pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan non formal yang berkaitan dengan kompetensi keuangan dan administrasi bisnis.

Pengukuran pengalaman komite audit berdasarkan pedoman FCGI (2002) yang menyatakan paling sedikit satu orang anggota komite audit merupakan profesional yang memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya, memiliki pemahaman mengenai risiko dan kontrol, serta mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. Pengalaman di bidang keuangan dapat dilihat pada profil anggota komite audit yang sedang atau pernah bekerja dalam bidang audit, perbankan, *finance*, menjadi akademisi pada universitas dalam negeri atau luar negeri, dan menjabat sebagai anggota komite audit maupun *internal auditor* pada perusahaan lain.

Pengetahuan keuangan anggota komite audit penelitian ini merupakan variabel *dummy*. Pemberian kode pada variabel ini adalah 1 (satu) jika minimal salah satu anggota komite audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang keuangan, dan 0 (nol) jika tidak terdapat satu pun anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang keuangan (Putra, 2010).

3.1.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kondisi *financial distress*. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan.

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara. Penentuan ukuran perusahaan pada penelitian ini didasarkan kepada *total asset* perusahaan (Machfoedz, 1994). Semakin besar total aset yang dimiliki diharapkan semakin mempunyai kemampuan dalam melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan (Storey 1994 dalam Fachrudin, 2008). Dalam memperoleh hasil total aset yang valid maka langkah yang dilakukan adalah transformasi data mentah menjadi data yang merupakan nilai logaritma dari data itu sendiri (\ln total aset).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2011. Pemilihan perusahaan manufaktur dikaitkan dengan kebutuhan sampel yang cukup besar pada penelitian ini. Perusahaan manufaktur merupakan kategori perusahaan yang memiliki sub kategori cukup banyak dibandingkan dengan kategori lain.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili karakteristiknya (Indriantoro dan Supomo, 1999). Sampel yang digunakan yaitu sampel yang diambil dari perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara keuangan. Penentuan sampel ini dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel yang memiliki kesesuaian

karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan.

Kriteria tersebut adalah:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2011.
- b. Perusahaan manufaktur yang memiliki *z-score* kurang dari 0 (no1) dan perusahaan yang memiliki *z-score* lebih dari 0 (no1).
- c. Perusahaan yang memiliki data laporan komite audit yang lengkap.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. Data keuangan untuk menghitung *z-score* diambil dari laporan keuangan auditan perusahaan tahun 2008-2011 dan ICMD 2009-2011.
2. Data untuk melihat karakteristik komite audit (ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan pengetahuan keuangan komite audit) yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan tahun 2008-2011.
3. Data yang berhubungan dengan variabel kontrol diperoleh dari laporan keuangan auditan perusahaan tahun 2009-2011 dan ICMD tahun 2009-2011.

Sesuai periode yang dipilih untuk penelitian ini, tidak terdapat intervensi atas penelitian ini (*non contrived setting*) (Hadiprajitno, 2012).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan data dokumentasi. Dokumentasi adalah penelitian arsip yang memuat kejadian masa lalu (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146). Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku, koran, majalah dan sebagainya.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, maksimum, dan minimum untuk menggambarkan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan pengetahuan keuangan anggota komite audit. Data yang diteliti akan dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu perusahaan *financial distress* dan untuk perusahaan *non financial distress*.

3.5.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian pada penelitian ini menggunakan Regresi Logistik, di dalam regresi logistik tidak mensyaratkan data yang berdistribusi normal seperti pada

analisis diskriminan. Multikolinieritas yang terjadi diantara variabel independen bisa membuat estimasi menjadi bias dan *standard error* yang tinggi (Hidayat, 2011). Sehingga diperlukan Uji Multikolinieritas, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≤ 10 . Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen juga dapat diketahui dengan melihat korelasi antar variabel (umumnya diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas (Ghozali, 2009).

3.5.3 Regresi Logistik

Untuk menguji seluruh hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi logistik (*regression logistic*) yang variabel bebasnya merupakan kombinasi antara variabel kontinyu (data metrik) dan kategorial (data non metrik). Campuran skala pada variabel bebas tersebut menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi, dengan demikian bentuk fungsinya menjadi logistik. Teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2005).

Model logit digunakan untuk melihat hubungan kemungkinan perusahaan akan mengalami kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) pada suatu periode dengan karakteristik komite audit pada periode yang sama. Variabel terikat yang digunakan merupakan variabel *binary*, yaitu apakah perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan atau tidak. Variabel bebas yang digunakan dalam model ini adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi

pertemuan komite audit, dan pengetahuan anggota komite audit. Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi logistik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS.

Persamaan yang dibentuk dengan menggunakan regresi logistik adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{\text{FD}}{1 - \text{FD}} = \text{DISTRESSED}_i$$

$$= \beta_0 + \beta_1 \text{ACSIZE}_i + \beta_2 \% \text{ACINDP}_i + \beta_3 \text{ACMEET}_i + \beta_4 \text{ACKNOW}_i + \beta_5 \text{SIZE}_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

DISTRESSED = Nilai 1 (satu) untuk perusahaan *financial distressed* dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan *non financial distressed*.

β_0 = Konstanta

ACSIZE = *Audit committee size* atau jumlah seluruh anggota komite.

ACINDP = *Independence of audit committee* atau proporsi anggota yang independen di dalam komite audit terhadap jumlah seluruh anggota komite audit.

ACMEET = *Frequency of audit committee meeting* atau frekuensi pertemuan komite audit selama satu tahun. Nilai 1 (satu) jika mengadakan pertemuan minimal empat kali, dan 0 (nol) jika mengadakan pertemuan kurang dari empat kali dalam satutahun.

ACKNOW = *Financial Knowledge of audit committee* atau pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit. Nilai 1 (satu) jika terdapat minimal satu anggota komite audit yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan, dan 0 (nol) untuk lainnya.

SIZE = Ukuran perusahaan = Ln total aset.

E_i = *Disturbance error*.

Pada model regresi logistik, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dari output model tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test)

Menurut Ghozali (2005), *goodness of fit test* dapat dilakukan dengan memperhatikan output dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit test*, dengan hipotesis:

H₀ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Dalam menilai overall fit model, dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Diantaranya:

a. Chi Square (X^2)

Tes statistik Chi Square (X^2) digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood* pada estimasi model regresi. *Likelihood* (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi $-2\log L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Penggunaan nilai X^2 untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan dengan membandingkan nilai $-2 \log likelihood$ awal (hasil *block number* 0) dengan nilai $-2 \log likelihood$ hasil *block number* 1. Dengan kata lain, nilai *chi square* didapat dari nilai $-2\log L_1 - 2\log L_0$. Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik.

b. *Cox and Snell's R Square dan Nagelkerke's R square*

Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran *R square* pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression*, maka digunakan *Nagelkerke R square*. *Nagelkerke R square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara

membagi nilai *Cox and Snell R square* dengan nilai maksimumnya (Ghozali, 2005).

c. Tabel Klasifikasi 2x2

Tabel klasifikasi 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam hal ini *financial distress* (1) dan *non financial distress* (0), sedangkan pada baris menunjukkan menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2005).

3. Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan berada pada kondisi *financial distress*. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

- a. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05).
- b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value*. Jika *p-value* (signifikan) $> \alpha$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value* $< \alpha$, maka hipotesis alternatif diterima.